



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

INSPEKTORAT

Jalan Benteng Pancasila No. 23 Telepon (0321) 399630
MOJOKERTO

Mojokerto, 24 September 2020

Nomor : 130.2/995/417.600/2020
Lampiran : 1 Lembar
Sifat : Penting
Perihal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Tahun 2020

K e p a d a
Yth. Ibu Walikota Mojokerto
di
MOJOKERTO

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja kepada semua perangkat daerah. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ada 2 tahapan yang kami lakukan dalam evaluasi atas akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yaitu :

1. Melakukan Pra Evaluasi.
2. Monitong dan Evaluasi Hasil Pra Evaluasi dengan cara memberikan asistensi guna perbaikan data dukung.

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan terhadap 5 komponen sbb :

Komponen	Bobot
A. Perencanaan Kinerja	30%
B. Pengukuran Kinerja	25%
C. Pelaporan Kinerja	15%
D. Evaluasi Kinerja	10%
E. Pencapaian Kinerja	20%
J u m l a h	100%

Nilai SAKIP setiap Perangkat Daerah sebagaimana terlampir.

Kami telah menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada semua pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik. Beberapa hal yang masih diperlukan untuk perbaikan kinerja sistem akuntabilitas kinerja secara menyeluruh sebagai berikut :

1. Masih banyak dokumen perencanaan yang belum konsisten antar bab dan antar dokumen perencanaan, untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan perlu melakukan asistensi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan memastikan bahwa Hasil Asistensi SAKIP Tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan baik jangka menengah (Renstra) maupun tahunan (Renja).
2. Perangkat Daerah telah berupaya menyempurnakan *cascading* kinerja dengan menggunakan pendekatan proses bisnis sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, namun belum diimplementasikan dengan baik dan belum dilengkapi dengan peta lintas fungsi. Untuk itu Bagian Organisasi perlu melakukan asistensi penyempurnaan peta proses bisnis kepada Perangkat Daerah.
3. Penyusunan LKJ(Laporan Kinerja) Perangkat Daerah tahun 2020 masih belum sepenuhnya mengacu PerMenPAN Nomor 53 tahun 2014, antara lain belum menjelaskan indikator yang diperjanjikan, tidak ada pembandingan yang cukup. Untuk itu Bagian Organisasi perlu melakukan asistensi penyusunan laporan kinerja baik interim maupun tahunan kepada Perangkat Daerah.
4. Beberapa Perangkat Daerah masih belum mampu membuat target dan laporan kinerja dengan baik karena data kinerjanya masih belum andal dan belum ada system pengumpulan data kinerja. Untuk itu semua Perangkat Daerah didorong untuk melaksanakan SOP pengumpulan data kinerja dan melakukan verifikasi data kinerja setiap triwulan sekali.
5. Monitoring dan evaluasi kinerja masih bersifat formalitas untuk itu monitoring dan evaluasi kinerja perlu lebih ditekankan untuk perbaikan kinerja baik sekarang maupun masa yang akan datang.
6. Pimpinan OPD dan SDM yang ditugaskan menangani manajemen kinerja perlu dilakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman terkait manajemen kinerja .

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja ini sebagai penerapan manajemen kinerja.

Atas perhatian dan arahan Ibu Walikota, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Yth ;
Ibu Sekretaris Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2020

NO.	Nama Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Predikat
1	Dinas Perhubungan	85,00	A (Memuaskan)
2	Inspektorat	84,56	A (Memuaskan)
3	Sekretariat DPRD	84,20	A (Memuaskan)
4	RSUD Dr.Wahidin Sudiro Husodo	83,03	A (Memuaskan)
5	Dinas Kesehatan	82,70	A (Memuaskan)
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,52	A (Memuaskan)
7	Badan Kepegawaian	81,37	A (Memuaskan)
8	Badan Perencanaan dan Pembangunan	81,32	A (Memuaskan)
9	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	81,17	A (Memuaskan)
10	Dinas Lingkungan Hidup	80,73	A (Memuaskan)
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80,51	A (Memuaskan)
12	Sekretariat Daerah	80,44	A (Memuaskan)
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	80,23	A (Memuaskan)
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80,17	A (Memuaskan)
15	Kecamatan Prajurit kulon	79,08	BB (Sangat Baik)
16	Dinas Pemuda, Olah Raga,Kebudayaan dan Pariwisata	77,65	BB (Sangat Baik)
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	75,34	BB (Sangat Baik)
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	74,28	BB (Sangat Baik)
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	74,08	BB (Sangat Baik)
20	Badan Penelitian dan Pengembangan	73,55	BB (Sangat Baik)
21	Dinas Pendidikan	73,31	BB (Sangat Baik)
22	Dinas Komunikasi & Informatika	72,77	BB (Sangat Baik)
23	Dinas Sosial	72,23	BB (Sangat Baik)
24	Kecamatan Magersari	69,03	B (Baik)
25	Kecamatan Kranggan	68,16	B (Baik)
26	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	67,88	B (Baik)
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	65,82	B (Baik)
28	Satuan Polisi Pamong Praja	65,72	B (Baik)
29	Kantor Perpustakaan dan Arsip	63,77	B (Baik)